

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI  
SEI KINJIL KECAMATAN BENUA KAYONG  
KABUPATEN KETAPANG**

Oleh :

Mas'ud Riesa Putra

NIM. E1031171041

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2023**

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DALAM  
MENANGGULANGI ABRASI PANTAI SEI KINJIL  
KECAMATAN BENUA KAYONG  
KABUPATEN KETAPANG**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Oleh:

Mas'ud Riesa Putra  
NIM. E1031171041

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DALAM  
MENANGGULANGI ABRASI PANTAI SEI KINJIL  
KECAMATAN BENUA KAYONG  
KABUPATEN KETAPANG**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Mas'ud Ricsa Putra

NIM. E1031171041

Disetujui Oleh:

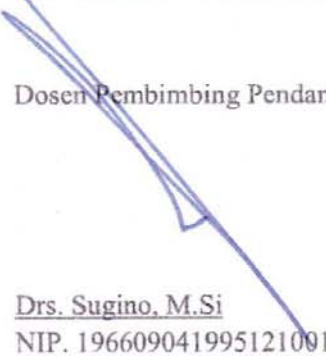
Dosen Pembimbing Utama



Joko Triyono SE, M.Si  
NIP. 195903071987031002

Tanggal.....

Dosen Pembimbing Pendamping



Drs. Sugino, M.Si  
NIP. 196609041995121001

Tanggal.....  
27/3 23

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DALAM  
MENANGGULANGI ABRASI PANTAI SEI KINJIL  
KECAMATAN BENUA KAYONG  
KABUPATEN KETAPANG**

Oleh:

**Mas'ud Riesa Putra**  
**NIM. E1031171041**

Dipertahankan di : Pontianak  
Pada Hari/Tanggal : Senin / 17 April 2023  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Sidang 1

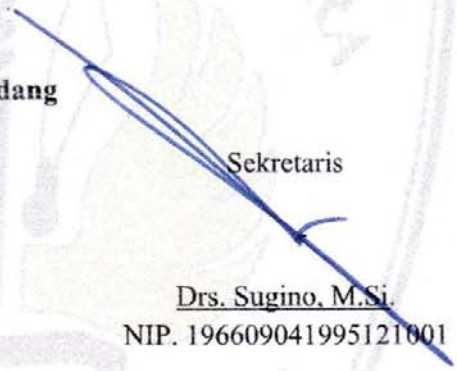
**Tim Sidang**

Ketua



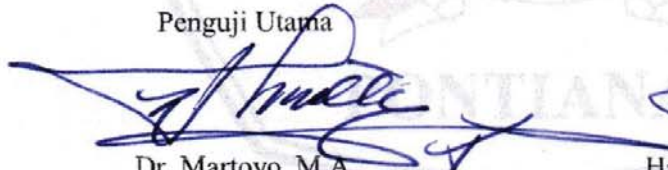
Joko Triyono SE, M.Si.  
NIP. 195903071987031002

Sekretaris



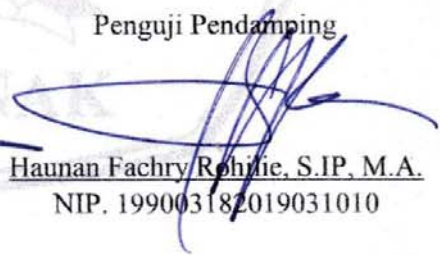
Drs. Sugino, M.Si.  
NIP. 196609041995121001

Penguji Utama



Dr. Martoyo, M.A.  
NIP. 196010031986031004

Penguji Pendamping



Haunan Fachry Rohilic, S.IP, M.A.  
NIP. 199003182019031010

Disahkan Oleh:  
Dekan FISIP Untan



Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197205212006041001

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah tidak adanya bangunan pemecah gelombang dan sistem peringatan dini di Pantai Sungai Kinjil, belum adanya peraturan yang jelas terkait dengan mekanisme penanganan abrasi pantai di Pantai Sungai Kinjil, dan sikap swadaya masyarakat dalam mengelola Pantai Sungai Kinjil menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dan mengelola Pantai Sungai Kinjil. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mitigasi bencana abrasi pantai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, yakni dengan menyediakan sistem peringatan dini, pengadaan bangunan pemecah ombak, penyediaan vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem pesisir akan dielaborasi lebih jauh untuk melihat sejauh mana pemenuhan perannya, yakni peran sebagai regulator, dinamisor, dan fasilitator (Yusuf dalam Raif 2019, 11). Hasil dari penelitian ini menampilkan 3 topik utama, yaitu peran pemerintah sebagai regulator dinilai tidak optimal. Hal ini terlihat dari aktualisasi aturan terkait beberapa kewajiban pemerintah dalam menjalankan amanat peraturan yang sangat minim. Kemudian peran pemerintah sebagai dinamisor dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari program penanaman mangrove di wilayah pantai tersebut yang dinilai tidak tepat sasaran dan sekarag hanya menyisakan bekas area tanam yang, sedangkan tumbuhan mangrove yang sudah ditanam hancur terkena ombak dan tenggelam karena abrasi yang terjadi di pantai tersebut. terakhir peran pemerintrah sebagai fasilitator dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari belum adanya bangunan pemecah gelombang yang efektif menangkal kerasnya ombak laut. Sejauh ini pemerintah daerah hanya membangun barau di tepi pantai yang pada pengaplikasiannya tidak tepat sasaran, sehingga barau tersebut sekarang rusak dan nyaris tiada fungsi sama sekali.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Penanggulangan, Abrasi Pantai.

## ABSTRACT

*The purpose of writing this thesis is to describe and analyze the role of the Regional Government of Ketapang Regency in tackling abrasion of Sei Kinjil Beach, Benua Kayong District, Ketapang Regency. The problems found in this study are the absence of breakwaters and early warning systems on Sungai Kinjil Beach, the absence of clear regulations related to the mechanism for handling beach abrasion on Sungai Kinjil Beach, and the self-help attitude of the community in managing Sungai Kinjil Beach shows a weak role government in mobilizing the community and managing Sungai Kinjil Beach. Regional Government obligations in the context of mitigating coastal abrasion disasters as explained in Government Regulation Number 64 of 2010 concerning Disaster Mitigation in Coastal Zones and Small Islands, namely by providing early warning systems, procuring omak breaking buildings, providing coastal vegetation, and managing coastal ecosystems will further elaborated to see how far it fulfills its role, namely the role of regulator, dynamo, and facilitator (Yusuf in Raif 2019, 11). The results of this study present 3 main topics, namely the government's role as a regulator is considered not optimal. This can be seen from the actualization of regulations regarding some of the government's obligations in carrying out regulatory mandates which are very minimal. Then the government's role as a dynamicator can be said to be not optimal. This can be seen from the mangrove planting program in the coastal area which is considered not on target and now only leaves a former planting area, while the mangrove plants that have been planted are destroyed by the waves and drowned due to abrasion that occurred on the beach. Finally, the government's role as a facilitator can be concluded that it has not run optimally. This is evident from the absence of a breakwater structure that effectively counteracts the rigors of sea waves. So far the local government has only built barau on the beach which in its application was not on target, so that the barau is now damaged and has almost no function at all.*

**Keywords:** Role of Government, Countermeasures, Coastal Abrasion.

## **RINGKASAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang”. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi di Pantai Sungai Kinjil yang terdiri dari tidak adanya sistem peringatan dini bencana dan bangunan pemecah ombak di Pantai Sei Kinjil, Kabupaten Ketapang, dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam penyediaan vegetasi pantai dan pengelolaan ekosistem, seperti halnya tidak ada aksi langsung Pemerintah Daerah dalam penyediaan pohon mangrove dan upaya perbaikan atau kampanye pelestarian eksistem pesisir yang tidak optimal. Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di Pantai Sungai Kinjil tersebut, maka hal ini mengindikasikan terdapat permasalahan utama, yakni belum optimalnya peran Perintah Kabupaten Ketapang dalam penanganan abrasi di Pantai Sungai Kinjil Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis peran peran Perintah Kabupaten Ketapang dalam penanganan abrasi di Pantai Sungai Kinjil Kabupaten Ketapang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Adapun objek dalam penelitian ini ialah terkait dengan peran pemerintah dalam menangani abrasi di Pantai Sungai Kinjil Kabupaten Ketapang. Dasar kebijakan pelaksanaan peran pemerintah tersebut ialah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Dalam dasar peraturan tersebut dijelaskan

bahwa peran pemerintah daerah dalam rangka mitigasi bencana gelombang laut ekstrim yang kemudian berdampak pada abrasi pantai ialah dengan menyediakan sistem peringatan dini, pengadaan bangunan pemecah ombak, penyediaan vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem pesisir.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran pemerintah sebagai regulator dapat disimpulkan belum berjalan dengan optimal. Adapun hal ini terlihat dari aktualisasi aturan terkait beberapa kewajiban pemerintah dalam menjalankan amanat peraturan yang sangat minim. Adapun hal ini terlihat dari belum ada sistem peringatan dini yang tersistematis dan terorganisir dengan baik. Sejauh ini pihak pemerintah daerah dalam melakukan peringatan dini hanya melalui himbauan tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini tentu tidak efektif dalam menjamin keselamatan warga maupun wisatawan yang berkunjung jika sewaktu-waktu bencana ombak besar atau abrasi pantai terjadi di Pantai Sugai Kinjil. 2) Peran pemerintah sebagai dinamisator dapat disimpulkan belum optimal. Hal ini terlihat dari program penanaman mangrove di wilayah pantai tersebut yang dinilai tidak tepat sasaran dan sekarang hanya menyisakan bekas area tanam yang, sedangkan tumbuhan mangrove yang sudah ditanam hancur terkena ombak dan tenggelam karena abrasi yang terjadi di pantai tersebut. Selain itu hal ini terlihat dari tidak adanya kehidupan ekosistem pesisir di pantai tersebut. Hal ini membuat lingkungan pantai menjadi gersang. 3) Peran pemerintah sebagai fasilitator dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari belum adanya bangunan pemecah gelombang yang efektif menangkal kerasnya ombak laut. Sejauh ini pemerintah daerah hanya membangun barau di tepi pantai yang pada



pengaplikasiannya tidak tepat sasaran, sehingga barau tersebut sekarang rusak dan nyaris tiada fungsi sama sekali..

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah dalam rangka menanggulangi abrasi di Pantai Sungai Kinjil. Adapun saran tersebut ialah seperti pemerintah sebaiknya membuat sistem peringatan dini yang tersistematis dan teroganisir dengan baik. Seperti dibangun menara pengawas dan di buat sistem peringatan dini yang terpadu dengan bekerja sama denga pihak BMKG sehingga dapat segera memberikan informasi yang cepat dan akurat terkait dengan perkiraan cuaca sehingga hal ini harapkan dapat memperkecil dapat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana abrasi yang ada di wilayah Pantai Sungai Kinjil. Pemerintah sebaiknya sebelum melakukan penyediaan vegetasi pantai, terlebih dahulu harus melakukan kajian yang mendalam terkait dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada di sana. Hal ini karena hutan mangrove yang sebelumnya di tanam oleh pemerintah ternyata tidak bertahan lama dan hancur. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik melakukan kajian terkait dengan metode penanaman yang efektif, sehingga kegiatan penyediaan vegetasi pantai dapat berjalan secara optimal.

Kemudian pemerintah sebaiknya sebelum memfokuskan kegiatan pada pariwisata, maka terlebih dahulu difokuskan pada pengelolaan ekosistem. Seperti pembangunan hutan mangrove yang sesuai dengan wilayah Pantai Sungai Kinjil. Hal ini karena jika ekosistem pesisirnya terkelola dengan baik, maka hal ini akan membuat wilayah tersebut menjadi lebih asri dan lestari serta menjadi daya tarik

tersendiri bagi wisatawan untuk lebih senang berkunjung ke Pantai Sungai Kinjil. Oleh karena itu pemerintah seharusnya menjadi fasilitator dalam menjamin dan mengelola ekosistem pesisir agar nyaman ditinggali oleh semua makhluk yang berada di atasnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Terakhir pemerintah sebaiknya segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, BPBD, dan Dinas PUPR dalam rangka membangun pemecah gelombang yang bersifat permanen dan efektif dalam rangka menangkal ombak yang berpotensi mempercepat abrasi di Pantai Sungai Kinjil.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mas'ud Riesa Putra  
Nomor Mahasiswa : E1031171041  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Pontianak, 10 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan,

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

*“Tidak perlu teriak untuk didengar. Tidak perlu terlihat untuk dipandang”*

### **Persembahan:**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa
2. Kedua orang tua saya, Bapak Gusti Mujahidin dan Ibu Eryanie yang telah mendidik saya dan merawat saya sedari kecil dan tiada hentinya memberikan kasih sayang dan motivasi agar selalu kuat melewati segala proses hidup.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan
4. Sahabat saya semuanya yang telah kebersamai selama perkuliahan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi
5. Teman- teman saya semuanya yang telah kebersamai selama perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul: *“Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang”* ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada suatu kendala yang berarti.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dalam kepenulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai dari skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khazanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bima Sujendra, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Joko Triyono, S.E., M.Si. selaku pembimbing utama, dan Drs. Sugino, M.Si. selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodologi penelitian, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
4. Dr. H. Martoyo, M.Si selaku penguji utama, dan Haunan Fachry Rohilie, S.IP., M.A selaku penguji pendamping yang telah mengevaluasi dan mengkritisi hasil penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
5. Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
7. Rekan-rekan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak angkatan 2017 yang telah memberikan support, saran dan masukan serta sebagai tempat bertanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Warga Desa Sungai Kinjil, Kabupaten Ketapang beserta para pejabat Pemerintahan Desa Sungai Kinjil yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi Penulis dalam melakukan penelitian. Semoga segala

kebaikan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya. Aamiin.

Pontianak, 10 Mei 2023  
Hormat Penulis,

Mas'ud Riesa Putra  
NIM. E1031171041

## DAFTAR ISI

|                                    | <i>Halaman</i> |
|------------------------------------|----------------|
| SAMPUL DALAM.....                  | i              |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....            | ii             |
| HALAMAN PENGESAHAN.....            | ii             |
| ABSTRAK .....                      | iv             |
| <i>ABSTRACT</i> .....              | v              |
| RINGKASAN SKRIPSI .....            | vi             |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....           | x              |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....        | xi             |
| KATA PENGANTAR .....               | xii            |
| DAFTAR ISI.....                    | xv             |
| DAFTAR TABEL .....                 | xviii          |
| DAFTAR GAMBAR .....                | xix            |
| DAFTAR LAMPIRAN.....               | xx             |
| BAB I PENDAHULUAN.....             | 1              |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....   | 1              |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....     | 9              |
| 1.3 Fokus Masalah Penelitian ..... | 9              |
| 1.4 Rumusan Masalah.....           | 10             |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....        | 10             |



|                                    |                                    |    |
|------------------------------------|------------------------------------|----|
| 1.6                                | Manfaat Penelitian .....           | 11 |
| 1.6.1                              | Manfaat Teoritis.....              | 11 |
| 1.6.2                              | Manfaat Praktis .....              | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....       |                                    | 13 |
| 2.1                                | Definisi Konsep .....              | 13 |
| 2.2.1                              | Abrasi dan Perubahan Iklim .....   | 14 |
| 2.2.2                              | Penanggulangan Bencana .....       | 17 |
| 2.2                                | Landasan Teori .....               | 18 |
| 2.2.1                              | Peran Pemerintah .....             | 19 |
| 2.3                                | Hasil Penelitian yang Relevan..... | 23 |
| 2.4                                | Alur Pikir Penelitian .....        | 27 |
| 2.5                                | Pertanyaan Penelitian .....        | 30 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... |                                    | 31 |
| 3.1                                | Jenis Penelitian .....             | 31 |
| 3.2                                | Langkah-Langkah Penelitian.....    | 32 |
| 3.3                                | Lokasi dan Waktu Penelitian.....   | 33 |
| 3.3.1                              | Lokasi Penelitian .....            | 33 |
| 3.3.2                              | Waktu Penelitian.....              | 33 |
| 3.4                                | Subjek dan Objek Penelitian.....   | 35 |
| 3.5                                | Teknik Pengumpulan Data .....      | 36 |
| 3.6                                | Instrumen Penelitian .....         | 38 |
| 3.7                                | Analisis Data.....                 | 39 |

|                                              |                                            |    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| 3.7.1                                        | Keabsahan Data .....                       | 39 |
| 3.7.2                                        | Teknik Analisis Data .....                 | 40 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... |                                            | 42 |
| 4.1                                          | Kondisi Geografis.....                     | 42 |
| 4.2                                          | Kondisi Demografi .....                    | 43 |
| 4.3                                          | Kondisi Pendidikan.....                    | 44 |
| 4.4                                          | Kondisi Kesehatan.....                     | 46 |
| 4.5                                          | Kondisi Ekonomi.....                       | 48 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....              |                                            | 52 |
| 5.1                                          | Peran Pemerintah Sebagai Regulator .....   | 54 |
| 5.2                                          | Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator ..... | 67 |
| 5.3                                          | Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator ..... | 75 |
| BAB VI PENUTUP .....                         |                                            | 86 |
| 6.1                                          | Kesimpulan.....                            | 86 |
| 6.2                                          | Saran .....                                | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                         |                                            | 89 |
| LAMPIRAN.....                                |                                            | 92 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                 | <i>Halaman</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....                                                               | 34             |
| Tabel 4. 1 Penduduk Desa Sungai Kinjil Menurut Etnis Tahun 2021 .....                           | 44             |
| Tabel 4. 2 Jumlah Guru di Desa Sungai Kinjil Berdasarkan Rentang Pendidikan<br>Tahun 2021 ..... | 45             |
| Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Sungai Kinjil Berdasarkan Mata Pencarian                        | 49             |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                | <i>Halaman</i> |
|------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian .....    | 29             |
| Gambar 5. 1 Area penanaman Hutan Mangrove..... | 65             |
| Gambar 5. 2 Steher Pantai Sungai Kinjil .....  | 73             |
| Gambar 5. 3 Barau di Pantai Sungai Kinjil..... | 84             |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                            | <i>Halaman</i> |
|--------------------------------------------|----------------|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....        | 92             |
| Lampiran 2. Foto Kegiatan Penelitian ..... | 97             |
| Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup.....      | 98             |
| Lampiran 4. Surat Tugas Penelitian .....   | 99             |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Wilayah pantai atau yang kerap disebut juga sebagai wilayah pesisir merupakan salah satu daerah yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Seperti daerah penghasil ikan, rumah bagi para nelayan, lokasi aktivitas pemerintahan, pedesaan tradisional, hingga destinasi pariwisata yang ramai dikunjungi oleh berbagai masyarakat, baik domestik maupun global. Dalam prosesnya, lingkungan pesisir bersifat dinamis dan selalu berubah mengikuti pergerakan alam yang membentuknya. Menurut Triatmodjo (1999, 43) perubahan yang terjadi di pantai adalah hasil dari berbagai elemen yang bekerja di sana, termasuk angin dan ombak. Perubahan yang terjadi secara alamiah tersebut dapat menciptakan keindahan baru seperti terbentuknya susunan bebatuan pecah di bibir pantai sehingga mempercantik kawasan pantai. Namun perubahan alam tersebut juga dapat menjadi bencana yang luar biasa. Seperti angin laut yang dapat merobohkan bangunan dan pohon disekitar pantai, naiknya air laut sehingga menciptakan banjir, hingga bencana lainnya yang dapat menyusahkan bahkan dapat mencelakai warga pesisir yang tinggal di sekitarnya.

Pantai Sei Kinjil merupakan salah satu wilayah pesisir yang terdapat di Desa Kinjil Pesisir, Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Sebagai salah satu wilayah pantai yang masuk dalam kawasan Selat Karimata, Pantai Sei Kinjil dianugerahi kekayaan alam berupa hasil tangkapan ikan yang melimpah. Hal ini dibuktikan dari

data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang (BPS, 2022) yang memuat data tentang produksi perikanan menurut jenis perikanan dan kecamatan, tahun 2018-2019. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa peringkat pertama penyumbang ikan laut terbanyak di Kabupaten Kapatang ialah Kecamatan Ketapang dengan total produksi ikan laut mencapai 32.427,86 Ton. Peringkat ke 2 ialah Kecamatan Kendawangan dengan total produksi sebanyak 7.805,5 Ton. Peringkat ke 3 ialah Kecamatan Delta Pawan dengan total produksi sebanyak 7.357,38 Ton. Peringkat ke 4 ialah Kecamatan Matan Hilir Selatan dengan total produksi mencapai 5.325,87 Ton. Kemudian peringkat ke 5 ialah Kecamatan Benua Kayong dengan total produksi mencapai 5.010,58 Ton. Keberhasilan Kecamatan Benua Kayong sebagai produsen terbesar ke 5 dari 27 Kecamatan di Kabupaten Ketapang tidak lepas dari kontribusi wilayah pesisir Sei Kinjil yang didominasi oleh para nelayan sehingga membuat peran dari Kecamatan Benua Kayong sangat besar dalam menyediakan hasil ikan dan penggerak perekonomian masyarakat sekitar, penyumbang pajak bagi daerah, hingga memenuhi kebutuhan pasar ikan ditingkat regional Kalimantan.

Selain kaya akan hasil tangkapan laut, Pantai Sei Kinjil juga merupakan daerah pantai yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Hal ini membuatnya menjadi salah satu obyek wisata pantai favorit bagi warga Kabupaten Ketapang. Selain menawarkan pesona alam yang indah, di lokasi pantai ini juga disediakan beberapa saung (bangunan kecil), serta jajanan untuk bersantai sembari menikmati keindahan Pantai Sei Kinjil terutama saat menjelang matahari mulai terbenam di ufuk barat cakrawala. Kolaborasi antara keindahan

alam, kegiatan perdagangan ikan dan para nelayan, serta fasilitas sederhana berupa saung dan jajanan ringan berhasil menarik pada wisatawan lokal maupun nasional untuk menyambangi pantai yang berjarak sekitar 20 kilometer dengan waktu tempuh setengah hingga 1 jam perjalanan dari pusat Ibu Kota Kabupaten Ketapang.

Layaknya sebuah wilayah pesisir pada umumnya, terdapat permasalahan serius yang kerap menghantui warga setempat. Adapun masalah tersebut dapat berupa gelombang pasang air laut, genangan air laut yang menghambat mobilitas penduduk, hingga abrasi pantai yang perlahan mengusir warga dari wilayah pesisir yang merupakan rumah bagi mereka. Menurut Wibowo (2012, 13), Abrasi pantai adalah proses erosi pantai yang disebabkan oleh arus dan gelombang laut yang berbahaya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa abrasi pantai merupakan proses pengikisan pesisir pantai yang diakibatkan oleh gelombang dan arus laut yang merusak, dimana pemicunya adalah keseimbangan alam yang terganggu di daerah tersebut. Berdasarkan pada konsep di telah disampaikan oleh ahli maupun dasar hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa abrasi pantai merupakan bencana alam yang berupa pengikisan material batu maupun pasir sehingga membuat wilayah pesisir menjadi semakin menyempit dan akhirnya habis. Adapun penyebab dari abrasi pantai tersebut ialah dapat dari faktor manusia dan faktor alam, seperti gelombang tinggi dan deburan ombak yang bersifat destruktif.



Memahami bencana alam berupa abrasi pantai yang sangat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir dan kehidupan pesisir itu sendiri, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menetapkan beberapa regulasi yang termuat di dalamnya guna mengantisipasi masalah bencana alam yang terdapat di area pesisir dan pulau-pulau kecil serta menangani permasalahan tersebut apabila telah terjadi. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut disebutkan bahwa Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir, peran Pemerintah Daerah menjadi sangat besar mengingat bahwa yang paling memahami keadaan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut ialah “si tuan rumahnya” sendiri. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K),

dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dijelaskan di atas kemudian menjadi salah satu tujuan pembangunan yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang oleh setiap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh pemikiran dan kemudian diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang menyebutkan mitigasi bencana wajib dimasukkan dalam rencana aksi maupun rencana pengelolaan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Bahkan pada Pasal 10 ayat (4) dalam PP Nomor 64 Tahun 2010 di atas dijelaskan bahwa implementasi dari mitigasi bencana tersebut paling sedikit meliputi pilihan tindakan penanggulangan bencana yang bersifat struktur fisik, atau non-struktur fisik, dan pelaku kegiatan penanggulangan bencana.

Semangat penanggulangan bencana yang terjadi di daerah sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa negara memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan peran serta masyarakat. berangkat dari hak otonomi daerah dan kewajiban daerah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan mitigasi bencana, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang memiliki wilayah

pantai atau pesisir diamanahkan untuk melakukan rencana aksi guna menciptakan rasa aman bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir dan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah pesisir.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2), PP Nomor 64 Tahun 2010 disebutkan bahwa Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) wajib memasukkan kegiatan mitigasi bencana yang ada dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana. Adapun sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 64 Tahun 2010 disebutkan bahwa mitigasi bencana untuk jenis bencana berupa gelombang laut berbahaya sebagaimana yang kerap terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Ketapang, seperti Sei Kinjil ialah penyediaan sistem peringatan dini, penggunaan bangunan peredam gelombang ekstrim, pengadaan vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem pesisir. Adapun aktualisasi dari pelaksanaan peran tersebut ialah dengan mendelegasikan wewenang penanggulangan bencana abrasi pantai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang, serta dalam implementasinya bersinergi dengan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, dan Pemerintah Desa serta warga desa setempat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ialah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam aktualisasinya, BPBD memiliki tugas dan fungsi. Adapun salah satu tugas dari

BPBD ialah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat. Sementara fungsi dari BPBD ialah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganannya secara cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Namun menurut hasil pra penelitian di lapangan menunjukkan bahwa di Pantai Sei Kinjil belum tersedia sistem peringatan dini. Bahkan petugas dan bangunan penjaga pantai juga belum tersedia di Pantai Sei Kinjil. Selanjutnya, bangunan pemecah gelombang juga belum tersedia di area pantai tersebut. Hal ini tentu sangat berbahaya mengingat data yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa gelombang air laut yang terjadi di Pantai Sei Kinjil mencapai 1,00 m – 1,50 m, dan bahkan juga dapat mencapai ketinggian hingga 2,00 m. Tingginya gelombang di wilayah pantai tersebut membuat laju abrasi pantai di Pantai Sungai Kinjil mencapai 10-15 meter dalam setahunnya.

Selain masalah yang berhubungan dengan pengadaan fasilitas pemecah gelombang, masalah lainnya hadir dari belum adanya sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam merumuskan kebijakan yang jelas terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir Pantai Sungai Kinjil. Hal ini terlihat dari pembangunan vegetasi pantai dan pengelolaan ekosistem pantai oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang yang belum optimal. Belum adanya upaya langsung dari Pemerintah Daerah dalam pengadaan vegetasi pantai, seperti pohon mangrove di

wilayah tersebut. Bahkan karena belum adanya aksi langsung pemerintah, warga secara swadaya melakukan kampanye bertajuk “Bantu Abrasi Pantai Kinjil Pesisir” yang dipublikasikan secara digital melalui laman [lindungihutan.com](http://lindungihutan.com). Inisiatif warga dalam menjaga lingkungannya memang sangat baik dan patut diapresiasi. Namun disisi lain juga hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah belum optimal dalam rangka menggerakkan dan mengelola wilayah pesisir Pantai Sungai Kinjil.

Menurut Yusuf dalam Raif (2019, 11) terdapat beberapa peran pemerintah, yaitu peran pemerintah sebagai regulator dimana pemerintah bertugas menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai dinamisator, dimana pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Serta yang terakhir yakni peran pemerintah sebagai fasilitator, dimana pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Berangkat dari fenomena yang telah diutarakan di atas, maka dapat ditarik benang merah permasalahan yang terdapat di Pantai Sungai Kinjil, yakni belum peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menangani abrasi Pantai

Sungai Kinil belum optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul *“Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang”*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Menurut Suriasumantri dalam Nawawi (2019, 23), identifikasi masalah merupakan tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana objek dalam suatu jalinan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Tidak terdapat bangunan pemecah gelombang dan sistem peringatan dini sebagai bentuk fasilitasi Pemerintah terhadap penanganan abrasi pantai di Pantai Sungai Kinjil.
2. Belum adanya peraturan yang jelas terkait dengan mekanisme penanganan abrasi pantai di Pantai Sungai Kinjil.
3. Sikap swadaya masyarakat dalam mengelola Pantai Sungai Kinjil menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dan mengelola Pantai Sungai Kinjil.

## **1.3 Fokus Masalah Penelitian**

Menurut Pasalong (2013, 23), fokus penelitian merupakan objek dari suatu penelitian, artinya pembahasan dari pemecahan masalah penelitian akan berfokus

atau menggunakan perspektif objek penelitian tersebut. Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi abrasi Pantai Sei Kinjil melalui perannya sebagai regulator, dinamisor, dan fasilitator.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono (2017, 36), rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data, dan juga penelitian. Selanjutnya rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini ialah: Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi abrasi pantai di Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Menurut Beckingham dalam Sugiyono (2018, 47), ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan dikenal sebagai tujuan penelitian. Tujuan studi dapat mengidentifikasi, mendefinisikan, menjelaskan, atau mengantisipasi situasi atau hasilnya, yang menentukan jenis studi yang akan dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Menurut Nazir (2013, 55), manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi berdasarkan tujuannya sebagai berikut.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan informasi dan masukan bagi perkembangan ilmu. Selanjutnya penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan referensi atau informasi ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mendukung proses pembangunan di daerahnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang pemerintahan, khususnya peran pemerintah daerah dalam mendukung proses pembangunan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan masukan kepada para *stakeholder* terkait dengan perencanaan penanggulangan abrasi pantai di Pantai Sei Kinjil agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Ketapang pada umumnya.